

RINGKASAN

**JEBI DASARI BR SEMBIRING
NIM 220510174**

**Analisis Yuridis Perbuatan Melawan
Hukum Dalam Sengketa
Pemberhentian Antar Waktu Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Kota
Lhokseumawe (Studi Putusan Nomor
9/Pdt.Sus-Parpol/2023/Pn Lsm)
(Dr. Yusrizal, S.H., M.H. Dan Dr.
Hadi Iskandar, S.H., M.H.)**

Tindakan pemberhentian seorang anggota DPRK oleh partai politik melalui mekanisme PAW menimbulkan kerugian sebagaimana dalam Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Lsm penggugat atas nama Suryadi melawan tergugat yaitu pengurus PAN. Penggugat merasa diberhentikan tanpa dasar yang sah sehingga meminta pengadilan menyatakan adanya pelanggaran hukum yaitu pada Pasal 1365 KUHPdata dan memulihkan kedudukannya. Pernyataan ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan yang mengharuskan penyelesaian sengketa internal partai melalui mekanisme khusus dan praktik di lapangan yang memunculkan upaya penyelesaian langsung ke pengadilan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindakan pemberhentian anggota DPRK oleh partai politik dalam Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Lsm, serta menelaah batas kewenangan pengadilan dalam mengadili sengketa yang bersumber dari keputusan internal partai.

Metode penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Lsm. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, lalu dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pemberhentian anggota DPRK oleh partai politik dalam Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Lsm dibatasi oleh asas *lex specialis derogat legi generali*, sehingga Pengadilan Negeri menolak memeriksa gugatan PMH karena sengketa pemberhentian dan PAW merupakan ranah internal partai yang wajib terlebih dahulu diselesaikan melalui Mahkamah Partai sesuai dengan Pasal 32 UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Batasan kewenangan pengadilan dalam mengadili sengketa pemberhentian anggota DPRK akibat keputusan internal partai politik berdasarkan Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Lsm ditegaskan melalui prinsip *exhaustion of remedies* dan *judicial restraint*, di mana pengadilan negeri secara absolut tidak berwenang menilai substansi, sehingga PN hanya berperan sebagai forum *ultimum remedium* yang menguji legalitas prosedural tanpa mengintervensi otonomi dan kebijakan internal partai politik.

Kesimpulannya adalah mekanisme pemberhentian anggota DPRK oleh partai politik harus lebih dahulu diselesaikan melalui Mahkamah Partai sebelum dapat diajukan ke PN. Disarankan agar partai politik menyusun *procedural checklist* untuk memastikan seluruh tahapan *lex specialis* terpenuhi.

Kata Kunci : Perbuatan Melawan Hukum, Sengketa, Pemberhentian Antar Waktu, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

SUMMARY

**JEBI DASARI BR SEMBIRING
NIM 220510174**

Juridical Analysis of Unlawful Acts in the Interim Dismissal Dispute of a Member of the Lhokseumawe City Regional House of Representatives (Case Study of Decision No. 9/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Lsm)
(Dr. Yusrizal, S.H., M.H. and Dr. Hadi Iskandar, S.H., M.H.)

The dismissal of a DPRK member through the PAW mechanism caused losses as seen in Decision No. 9/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Lsm, in which the plaintiff, Suryadi, sued the PAN party management for removing him without a valid basis, alleging an unlawful act under Article 1365 of the Civil Code and requesting reinstatement. This reflects a discrepancy between legal provisions requiring internal party dispute resolution through a special mechanism and the practice of bringing the matter directly to court.

This research aims to analyze the dismissal of a DPRK member in Decision No. 9/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Lsm and to examine the court's jurisdictional limits in adjudicating disputes arising from internal party decisions.

This study uses a normative juridical method by reviewing legislation and the relevant court decision, supported by primary, secondary, and tertiary legal materials collected through literature study and analyzed qualitatively.

*The findings show that the dismissal mechanism is restricted by the principle of *lex specialis derogat legi generali*, leading the District Court to reject the unlawful-act claim because PAW disputes fall under internal party matters that must first be resolved through the Party Court pursuant to Article 32 of Law No. 2/2011 on Political Parties. The court's jurisdictional limits are reinforced by the principles of exhaustion of remedies and judicial restraint, meaning the District Court has no authority to assess the substance of the dispute and only serves as an *ultimum remedium forum* to review procedural legality without interfering in party autonomy.*

*The conclusion is that the dismissal of a DPRK member must be resolved through the Party Court before being brought to the District Court. It is recommended that political parties develop a procedural checklist to ensure all *lex specialis* stages are fulfilled.*

Keywords: Unlawful Act, Dispute, Interim Dismissal, Regional House of Representatives.